

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sangat penting untuk menggunakan sistem akuntansi dalam perusahaan untuk memproses dan mengelola semua kegiatan operasional dan eksternal perusahaan. Dengan diperkenalkannya sistem akuntansi ke dalam suatu perusahaan, diharapkan semua kegiatan perusahaan terutama kegiatan yang berkaitan erat dengan tingkat arus kas yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar dapat berjalan dengan baik. Sistem akuntansi diperlukan untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban.

Ada beberapa subsistem yang bekerja secara harmonis untuk mengubah data keuangan menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan untuk mengambil keputusan bisnis, sesuai dengan sistem akuntansi seperti yang didefinisikan oleh Azhar Susanto (2011:124). Karena pentingnya sistem akuntansi, Karena itu, setiap perusahaan harus memiliki sistem akuntansi yang berfungsi dengan baik. Informasi keuangan akan kurang akurat jika sistem akuntansinya jelek. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan penggunaan uang benar-benar digunakan untuk pembiayaan perusahaan, diperlukan sistem akuntansi yang tepat karena sifat kas yang mudah digelapkan dan disalahgunakan. Sistem

akuntansi pengeluaran kas digunakan.

Program pembangunan yang direncanakan pemerintah tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya suntikan dana. Pengeluaran adalah peristiwa yang terjadi ketika perusahaan mendistribusikan barang atau jasa dan mengumpulkan uang dari pelanggan. (Mujilan 2012:45). Pengeluaran kas di perusahaan cukup besar dengan menggunakan cek. Kas diakui sebagai nilai nominal kas atau setara kas, dan sebagai rekening giro pada bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Dana kas kecil hanya dapat digunakan untuk transaksi kecil, jadi cek bukanlah pilihan. Menurut (Mulyadi, 2017:425). Semua sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengeluaran kas harus sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku Sistem terintegrasi adalah kumpulan prosedur yang dihubungkan bersama untuk menjalankan fungsi inti organisasi, sedangkan prosedur adalah deskripsi kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan banyak orang dalam satu atau lebih departemen untuk memastikan bahwa tugas organisasi yang berulang ditangani secara konsisten.

Ini tidak hanya berlaku untuk sektor swasta tetapi juga untuk lembaga pemerintah. Warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk terus mendorong pemerintahan yang lebih baik. Setidaknya ada tiga faktor yang diperlukan untuk tata pemerintahan yang baik: keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Agar transparan, informasi harus tersedia secara bebas, dan partisipasi berarti bahwa masyarakat secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pengambilan keputusan melalui badan perwakilan yang dapat memandu keinginan tersebut. Sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban masyarakat umum atas segala tindakan yang dilakukan. Selain itu, sejak reformasi, tuntutan publik

terhadap transparansi pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara semakin meningkat.

Transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas adalah semua kemungkinan hasil dari sistem akuntansi yang dirancang dengan baik. Untuk melacak keuangan pemerintah, unit akuntansi dan pelaporan dibentuk. Penting untuk diingat bahwa setiap bisnis memposting laporan keuangan sebagai data, yang dapat digunakan untuk tujuan internal dan eksternal, dan itu termasuk lembaga pemerintah. Semua laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi pemerintah harus mematuhi standar akuntansi publik yang diterima secara luas. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memperoleh manfaat dari penerapan sistem akuntansi yang transparan dan tepat.

Dalam menghadapi situasi likuiditas yang berisiko tinggi ini, Sangat penting bahwa operasi perusahaan mencakup mekanisme untuk memastikan keamanan uang tunainya. Sistem dan prosedur pengeluaran kas yang baik merupakan bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan. Sebagai hasil dari sistem pengeluaran kas ini, dimungkinkan untuk memantau dan mengontrol pergerakan arus kas keluar. Pengendalian internal secara berkala atas keadaan laporan keuangan perusahaan atau pemerintah dapat mengurangi risiko uang dicuri.

Pada dasarnya pengendalian internal tidak dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan kesalahan, tetapi sistem pengendalian internal memungkinkan adanya kesalahan dan penyimpangan sehingga dapat diidentifikasi walaupun berupa kas. Untuk tujuan menyoroti frekuensi pengalihan uang tunai, teknik ini digunakan. Manajemen pemerintah daerah ditangani oleh departemen pelaporan dan audit. Sistem akuntansi bagi satuan kerja perangkat daerah (PPKD)

dan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) (SKPD). Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan bertanggung jawab atas sistem akuntansi (PPK-SKPD). Penerimaan kas, pengeluaran kas, pengeluaran non tunai, dan aset semuanya termasuk dalam sistem akuntansi pemerintah daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Sistem akuntansi keuangan adalah sistem yang mengatur secara lengkap tata cara akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, tata cara akuntansi selain kas, dan tata cara akuntansi aset bagi pemerintah daerah di Indonesia. Sangat penting bahwa semua langkah ini memperhitungkan fungsi akun yang terkait dengan dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan, dan prosedur teknis. Pemerintah daerah wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Pasal 308 dan 309 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang menetapkan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah. dokumen dan tata cara pengelolaan keuangan daerah. Direktorat Jenderal Pembinaan Pemerintah memfasilitasi penerbitan SE.903/316/BAKD, yang berisi pedoman sistem dan tata cara administrasi dan akuntansi, sebagai bagian dari pelaksanaan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, oleh Menteri Dalam Negeri. Urusan. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di tingkat daerah.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang membutuhkan sistem pengeluaran uang tunai. Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil Menengah menjadi fokus Pelayanan Pemerintah Daerah. Sekretaris daerah bertanggung jawab langsung kepada bupati yang mengangkat

kepala dinas. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng memiliki beberapa permasalahan terkait sistem pengeluaran kas, antara lain belum adanya arus kas yang tepat. Permasalahan tersebut menjadi suatu kelemahan yang harus ditanggulangi, seperti adanya kas yang dapat dengan mudah digelapkan dan diselewengkan, masih terdapat kesalahan dalam format laporan keuangan serta terdapat kekurangan dari prosedur yang ada sehingga membuat lemahnya sistem pengendalian internal, khususnya dalam pengeluaran kas.

Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menggunakan sistem akuntansi pengeluaran kas berupa Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Aplikasi SIPD merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi inisiatif pembangunan daerah. Ini mendokumentasikan, mengumpulkan, mengatur, dan memproses data agar lebih mudah diakses oleh masyarakat umum dan pengambil keputusan. Kelebihan menggunakan SIPD ini yaitu tidak ada duplikasi dana; proses perencanaan dan tata kelola keuangan daerah seragam; kegiatan utama organisasi dioptimalkan; pengawasan dan audit lebih mudah dilakukan, adapun kekurangan dari aplikasi SIPD yaitu saat terjadi pengimputan data yang salah tidak bisa langsung diperbaiki melainkan harus meminta permohonan perbaikan kepada pemerintah pusat dan harus menunggu kurang lebih 2 hari kerja.

Berdasarkan latar belakang diatas, oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut dengan judul **"Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,**

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas, dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Terdapat kas yang dapat dengan mudah digelapkan dan diselewengkan.
2. Masih terdapat kesalahan dalam format laporan keuangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
3. Terdapat kekurangan dari prosedur yang ada sehingga membuat lemahnya sistem pengendalian internal, khususnya dalam pengeluaran kas.

1.3 Batasan Masalah

Sistem pengeluaran kas pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng, menjadi fokus penelitian ini, yang meliputi uraian kegiatan, fungsi terkait, informasi yang diperlukan, dokumen terkait, unsur pengendalian internal, dan bagan alir dalam sistem pengeluaran kas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana sistem akuntansi pengeluaran kas Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Buleleng.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui sistem akuntansi pengeluaran kas pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, diharapkan bisa memberi manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan serta pengetahuan tentang sistem akuntansi pengeluaran kas pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengaplikasikan teori yang di dapat pada bangku perkuliahan dengan kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan sistem pengeluaran kas.

2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi lembaga UNDIKSHA terutama di Fakultas Ekonomi untuk memberikan evaluasi terhadap mahasiswa tentang sejauhmana penerapan bidang ilmu yang ditekuni dibangku kuliah serta untuk memperkaya referensi perpustakaan pada umumnya dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang sama dan

berhubungan dengan sistem pengeluaran kas.

3. Bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Sebagai bahan pertimbangan dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang dapat digunakan untuk meninjau kembali mengenai pentingnya mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait sistem pengeluaran kas.

